

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Pada bab ini akan membahas yang pertama, yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variabel yang diteliti dan yang kedua penelitian terdahulu. Selain itu, membahas tentang kerangka pemikiran yang menjelaskan mengenai model variabel dan diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 *Tax Ratio*

3.1.1.1 Pengertian *Tax Ratio*

Menurut (World Bank, 2015) Tax ratio merupakan suatu perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengetahui besaran porsi pajak dalam perekonomian suatu negara dan seberapa baik pemerintah mengatur sumber daya ekonomi suatu negara. Dalam menghitung tax ratio setiap negara memiliki caranya masing-masing dengan dilihat dari komponen penerimaan pajaknya. Namun dalam menghitung rasio tersebut tetap berpedoman pada *International Monetary Fund* (IMF) atau OECD. Tujuan utama perpajakan adalah meningkatkan pendapatan negara guna mendanai penyediaan barang dan jasa publik. Menurut (Nalyanya, 2022) negara yang mampu menghasilkan pendapatan yang memadai cenderung dapat mengurangi defisit anggaran, yang tercermin dari berkurangnya ketergantungan pada pinjaman eksternal. Kemampuan

suatu negara dalam mengoptimalkan potensi pajak yang tersedia dalam perekonomiannya dapat diukur melalui rasio pajak terhadap PDB (*tax-to-GDP ratio*).

Adapun definisi pajak menurut beberapa ahli, menurut (Tanzi & Zee, 2000) dalam *International Monetary Fund*, *tax ratio* adalah indikator kinerja fiskal yang mengukur seberapa efektif suatu negara memobilisasi sumber daya fiskalnya melalui pajak. Rasio ini digunakan untuk membandingkan kapasitas fiskal antar negara dan menilai efisiensi kebijakan pajak. Menurut (Nalyanya, 2022) dalam *World Bank*, *tax ratio* merupakan ukuran untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak terhadap total output ekonomi suatu negara. *Tax ratio* yang rendah menunjukkan adanya potensi pendapatan yang belum teroptimalkan. *Tax ratio* yang rendah seringkali menunjukkan adanya potensi pendapatan pajak yang belum teroptimalkan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya sistem administrasi pajak, tingginya tingkat ekonomi informal, rendahnya kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak yang kurang tepat sasaran, atau struktur ekonomi yang lebih dominan pada sektor-sektor dengan kontribusi pajak rendah. Oleh karena itu, *tax ratio* menjadi alat penting bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi kinerja fiskal negara dan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan negara.

Pengertian pajak menurut Edwin R. A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan “*tax is compulsory contribution from person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*” (Seligman, 2008).

Dari definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. *Tax ratio* juga berperan sebagai indikator kemampuan negara dalam mencapai keberlanjutan anggaran, dengan *tax ratio* yang optimal, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan membiayai pembangunan nasional secara mandiri, sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

3.1.1.2 Sumber *Tax Ratio*

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan penghasilan, pemungutan, objek dan lainnya. Jenis jenis pajak di ASEAN menurut (Shira, 2024) yaitu :

1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak penghasilan dipungut atas pendapatan atau pendapatan yang menguntungkan dari semua individu di yurisdiksi tertentu. Di kawasan ASEAN, semua negara kecuali Brunei dan Kamboja menggunakan sistem Pajak penghasilan progresif di mana tarif pajak yang dikenakan meningkat sebanding dengan peningkatan penghasilan kena pajak. Akibatnya, individu dengan penghasilan kena pajak tinggi dikenakan pajak secara proporsional lebih tinggi daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Tingkat Pajak penghasilan bervariasi di seluruh kawasan ASEAN, dengan beberapa negara anggota membatasi PIT maksimum mereka sebanyak 35 persen dan yang lain hanya 20 persen.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & *Goods and Services Tax* (GST)

Pajak tidak langsung dipungut pada setiap tingkat produksi barang dan jasa dan umumnya termasuk dalam harga produk. Pajak semacam itu menambah biaya produk yang dapat dibeli dan kurang jelas bagi konsumen dibandingkan bentuk pajak lain seperti *Corporate Income Tax* (CIT) atau Pajak penghasilan; keduanya mengharuskan bisnis atau individu untuk membayar pajak yang masih harus dibayar langsung ke pemerintah. Di ASEAN, bentuk pajak tidak langsung yang paling populer adalah GST dan PPN. Padahal negara-negara seperti Brunei tidak mengenakan pajak tidak langsung sama sekali. Kami telah membandingkan pajak tidak langsung di seluruh ASEAN di bab berikutnya.

3. Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak adalah pajak yang dipungut pada individu atau perusahaan yang melakukan pembayaran kepada entitas non-residen mana pun. Biasanya, persentase tarif pajak sangat bervariasi tergantung pada subjek pajak, dan perjanjian yang ditandatangani antara pemerintah dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Di ASEAN, pemotongan pajak banyak digunakan dalam bentuk pembayaran dividen, bunga dan royalti,

4. Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan (CIT) adalah pajak langsung yang dipungut oleh yurisdiksi atas pendapatan perusahaan atau keuntungan yang dapat dibebankan yang timbul pada perusahaan. Di ASEAN, setiap negara memberlakukan tarif CIT yang bervariasi, dengan beberapa yurisdiksi memantapkannya setinggi 30 persen dan yang lain pada tingkat yang relatif rendah yaitu 17 persen. Tingkat

ini ditentukan oleh segudang faktor termasuk prioritas pemerintah (apakah lebih menekankan pada pendapatan negara atau investasi), sifat ekonominya (seberapa bergantung pada investasi asing), ukuran negara, dan tingkat perkembangannya.

3.1.1.3 Fungsi *Tax Ratio*

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) rasio pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) rasio pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*reguler*) rasio pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) rasio pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) rasio pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulatoir*) rasio pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi rasio pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

3.1.1.4 Teori *Tax Ratio*

1. Teori Compliance Allingham&Sandmo

Expected Utility Theory Model dari Allingham&Sandmo (Model A-S 1972) menjelaskan bahwa konsep ekspektasi utilitas untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kalangi (2017) memaparkan bahwa teori ini memakai variabel-variabel yang juga merupakan faktor-faktor ekonomi yang meliputi penghasilan yang akan dikenakan pajak, tarif, serta peluang untuk diperiksa serta sanksi administrasi. Apakah seseorang akan melaporkan pajaknya secara utuh dan jujur atau tidak, merupakan keputusan yang akan dipengaruhi utilitas ekspektasi dari wajib pajak itu sendiri. Model ini menganggap bahwa *expected utility* dapat dihitung dengan mempertimbangkan pendapatannya dengan risiko terkena pinalti. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan, pada gilirannya, meningkatkan *tax ratio*.

2. Teori Klasik Adam Smith

Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, pajak harus didasarkan pada empat prinsip utama yang dikenal sebagai *The Four Canons of Taxation*, yaitu:

- a. *Equity* (Keadilan): Pajak harus dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Negara dengan distribusi pendapatan yang lebih merata cenderung memiliki *tax ratio* yang lebih baik, karena masyarakat merasa lebih adil dan termotivasi untuk membayar pajak.
- b. *Certainty* (Kepastian): Besarnya pajak dan tata cara pembayarannya harus jelas dan pasti. Negara yang memiliki transparansi pajak membuat *tax ratio* nya tinggi karena masyarakat percaya bahwa pajak tersebut digunakan dengan benar.
- c. *Convenience* (Kemudahan): Pajak harus dipungut pada waktu dan cara yang paling mudah bagi wajib pajak.
- d. *Economy* (Efisiensi): Pajak harus dipungut dengan biaya yang minimal agar tidak membebani wajib pajak dan negara.

3.1.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Ratio*

Adapun faktor faktor yang dapat mempengaruhi *tax ratio* yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Tax ratio sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Saat ekonomi berkembang, pendapatan individu dan perusahaan cenderung meningkat, yang secara otomatis memperluas basis perpajakan. Sektor-sektor ekonomi yang berkembang memberikan kontribusi lebih besar terhadap pajak penghasilan, pajak

perusahaan, serta pajak konsumsi. Sebaliknya, saat terjadi kontraksi ekonomi seperti resesi, penurunan pendapatan dan konsumsi akan berdampak negatif pada *tax ratio*.

2. Inflasi

Inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat dan perusahaan, yang pada gilirannya berdampak pada *tax ratio*. Inflasi yang terkendali biasanya meningkatkan *tax ratio* melalui kenaikan harga barang dan jasa, yang meningkatkan jumlah pajak yang dipungut. Namun, inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak sebaliknya, yakni mengurangi *tax ratio* akibat menurunnya konsumsi dan investasi. Menurut (Stotsky & WoldeMariam, 1997), inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan distorsi dalam perekonomian dan mengurangi efisiensi pengumpulan pajak.

3. Kebijakan Pajak

Perancangan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap *tax ratio*. Kebijakan yang menetapkan tarif pajak yang terlalu tinggi atau rendah, sistem yang rumit, serta rendahnya tingkat kepatuhan pajak, semuanya dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan negara. Reformasi perpajakan yang bertujuan menyederhanakan sistem dan meningkatkan kepatuhan pajak terbukti mampu memperbaiki penerimaan negara secara signifikan.

4. Investasi Asing Langsung (FDI)

FDI dapat meningkatkan *tax ratio* dengan memperluas basis pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keuntungan perusahaan. Selain itu, FDI juga berpotensi meningkatkan pajak

perusahaan dan pajak atas dividen. Penelitian yang dilakukan oleh (Binha, 2020) menunjukkan adanya hubungan positif antara FDI dan *tax ratio* di negara-negara ASEAN.

5. Perdagangan Internasional dan Ekspor

Negara-negara yang aktif dalam perdagangan internasional, terutama yang memiliki sektor ekspor yang kuat, cenderung memperoleh *tax ratio* yang lebih besar. Peningkatan ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada bertambahnya basis pajak dari sektor manufaktur, jasa, dan perdagangan. Menurut (Mendoza & Tesar, 1998), perdagangan internasional yang aktif mampu memperbesar *tax ratio* melalui peningkatan pendapatan nasional.

6. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor esensial dalam menentukan besarnya *tax ratio*. Negara yang memiliki sistem perpajakan yang transparan dan adil cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, yang kemudian berdampak pada peningkatan *tax ratio*. Sebaliknya, negara yang mengalami tingkat penghindaran pajak yang tinggi atau terdapat korupsi dalam administrasi perpajakan seringkali menghadapi masalah defisit penerimaan.

7. Kondisi Politik dan Stabilitas

Stabilitas politik dan kepastian hukum sangat berpengaruh terhadap konsistensi *tax ratio*. Ketidakstabilan politik, konflik, atau perubahan kebijakan secara tiba-tiba dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan tingkat investasi dan konsumsi, serta mengurangi *tax ratio*.

3.1.1.6 Elastisitas *Tax Ratio* terhadap Inflasi, Ekspor dan *Foreignn Direct Investment*

Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur tingkat responsivitas suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Elastisitas digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel ekonomi, seperti harga dan permintaan, pendapatan dan konsumsi, atau pajak dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2003). Elastisitas *tax ratio* adalah ukuran yang menunjukkan tingkat responsivitas *tax ratio* terhadap variabel inflasi, ekspor dan FDI. Secara umum, elastisitas dapat dinyatakan sebagai:

$$E\partial = \frac{\partial TR}{\partial x} \times \frac{x}{TR}$$

Dimana:

$E\partial$: Nilai elastisitas

∂TR : Persentase perubahan *tax ratio* (Y)

∂x : Persentase perubahan variabel x yaitu inflasi, ekspor dan FDI

x : Inflasi

TR : *Tax ratio*

Adapun kriteria elastisitas yaitu:

- a. $E > 1$: Elastis dimana variabel yang diukur sangat responsif terhadap perubahan variabel penyebab.

- b. $E = 1$: Uniter Elastis: Perubahan pada variabel penyebab menghasilkan perubahan proporsional pada variabel yang diukur.
- c. $E < 1$: Inelastis: Variabel yang diukur kurang responsif terhadap perubahan variabel penyebab.
- d. $E = 0$: Tidak Elastis (*Perfectly Inelastic*): Tidak ada perubahan pada variabel yang diukur meskipun variabel penyebab berubah

2.1.2 Inflasi

2.1.2.1 Pengertian Inflasi

Dalam konsep makro ekonomi, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Sebagaimana ditulis (Suseno & Astiyah, 2009) dalam konteks tersebut terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut inflasi. Kenaikan harga pada komoditas tertentu yang terjadi karena faktor musiman, misalnya menjelang hari-hari besar atau karena gangguan supply sesaat dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan, tidak disebut inflasi. Inflasi adalah indikator makroekonomi yang sangat penting karena mempengaruhi nilai uang sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, Presiden Gerald Ford dari USA pernah menyatakan: *Inflation is the number one public enemy*, atau “Inflasi adalah musuh masyarakat yang utama.”

Pengertian inflasi menurut (Setriawati, 2021) inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan berkepanjangan dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan nilai uang akan turun. Pengertian tersebut mengandung makna :

1. Adanya kecenderungan harga-harga meningkat walaupun suatu masa tertentu turun atau naik dibandingkan sebelumnya, tetapi tetap memperlihatkan kecenderungan yang meningkat
2. Kenaikan tingkat harga berlangsung secara terus menerus, tidak terjadi pada suatu saat/satu waktu saja.
3. Kenaikan harga pada tingkat harga umum, bukan hanya beberapa produk komoditas saja.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Nopirin (1987:27), jenis-jenis inflasi terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Inflasi menurut Sifatnya

- a. Inflasi merayap (*creeping inflation*)

Inflasi merayap yaitu tingkat inflasi yang rendah kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan dengan lambat dalam jangka yang relatif lama dengan persentase yang kecil.

- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Inflasi menengah yaitu tingkat inflasi yang cukup besar. Angka inflasi ini ditandai dengan 2 digit maupun 3 digit, seperti 10%, 16%, 21%, dan sebagainya. Dalam kondisi ini harga-harga dalam bulan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

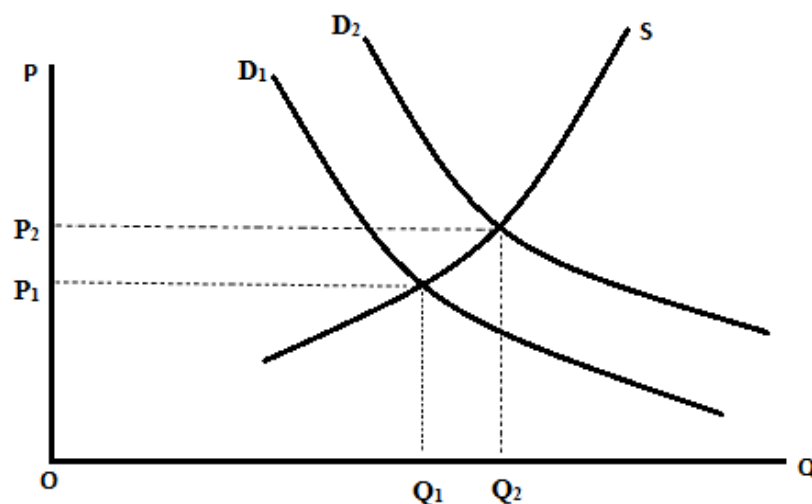
- c. Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

Inflasi tinggi atau yang biasa disebut *hyper inflation* yaitu inflasi yang paling parah, mengakibatkan harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjakan dengan mencetak uang.

2. Inflasi menurut Sebabnya

a. *Demand Pull Inflation*

Jenis inflasi ini terjadi akibat adanya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Hal ini menyebabkan inflasi terjadi akibat adanya sekelompok masyarakat lebih banyak memanfaatkan barang dan jasa, sehingga permintaan bertambah, sedangkan penawaran masih tetap dan akhirnya harga menjadi naik. Dalam hal ini inflasi terjadi karena tarikan permintaan yaitu, besarnya permintaan masyarakat akan barang-barang, sehingga memicu perubahan tingkat harga naik. Dengan kata lain, inflasi terjadi karena kenaikan permintaan total yang disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar.



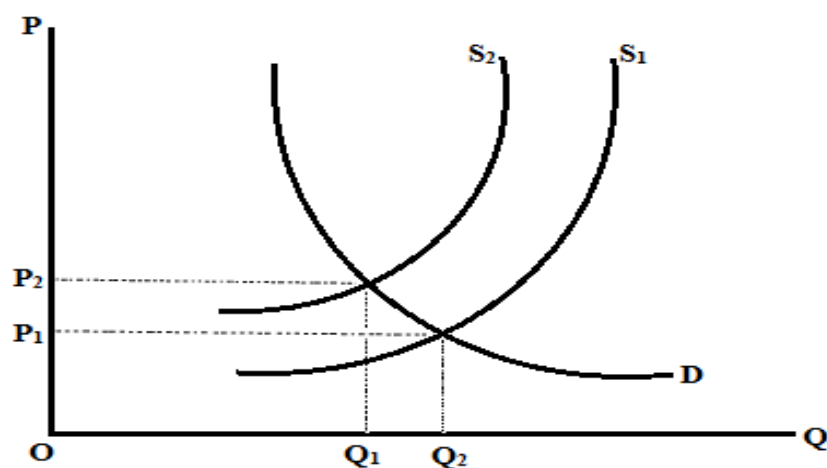
Sumber: Ruang Guru

Gambar 2. 1 Demand Pull Inflation

Gambar 2.1 *demand pull inflation* menunjukkan permintaan masyarakat akan barang-barang secara keseluruhan (*aggregate demand*) bertambah. Hal tersebut disebabkan karena uang baru atau karena kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau karena bertambahnya pengeluaran untuk investasi pihak swasta karena kredit murah, maka kurva *aggregate demand* bergeser dari D_1 ke D_2 akibatnya harga naik dari P_1 ke P_2 .

b. Cost Pull Inflation

Jenis inflasi ini disebabkan adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Kelangkaan produksi terjadi karena adanya ketidaklancaran aliran distribusi atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal yang dapat memicu kenaikan harga.



Sumber: Ruang Guru

Gambar 2. 2 Cost Pull Inflation

Gambar 2.2 *Cost Push Inflation* menunjukkan bahwa apabila ongkos produksi naik yang disebabkan oleh karena kenaikan harga faktor-faktor produksi baik

yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri, maka kurva penawaran masyarakat (*aggregate supply*) bergeser dari S_1 ke S_2 , sehingga harga naik dari P_1 ke P_2 .

2.1.2.3 Teori Inflasi

1. Teori Kuantitas Uang Milton Friedman

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori yang dikenal dengan teori kuantitas (tentang uang). Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Teori kuantitas tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga. Teori kuantitas uang juga terkait dengan teori tentang (1) proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga, (2) mekanisme transmisi moneter, (3) netralitas uang, dan (4) teori moneter tentang tingkat harga. Ahli ekonomi moneter yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran Monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ini adalah ekonom Milton Friedman yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1976. Tokoh ini membuat pernyataan yang sangat terkenal, yaitu bahwa *inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*

Teori permintaan uang pada dasarnya menyatakan bahwa permintaan uang masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi yang antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. Friedman menegaskan bahwa ketika jumlah uang beredar meningkat secara berlebihan, inflasi menjadi

dampak utama. Dengan adanya inflasi, harga barang dan jasa naik, dan meskipun *tax ratio* nominal bisa meningkat, nilai riilnya berkurang. Ini karena daya beli uang menurun, sehingga nilai *tax ratio* riil yang dikumpulkan pemerintah menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, inflasi bisa menggerus daya beli dari pendapatan pajak yang diperoleh. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi apa yang disebut sebagai deflasi.

2. Teori Keynes

Keynes mengamati bahwa mekanisme pasar mungkin tidak selalu dapat menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian, terutama dalam situasi kelebihan penawaran dan deflasi. Oleh karena itu, teori Keynesian mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk pengendalian inflasi. Teori ekonomi Keynesian menyatakan bahwa inflasi diakibatkan oleh keinginan masyarakat untuk hidup di luar kemampuan mereka, yang menyebabkan mereka meminta barang yang lebih efisien daripada yang tersedia, yang pada gilirannya menyebabkan kesenjangan inflasi terjadi. Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, pengeluaran konsumen dan investasi menurun, sehingga pemerintah harus mengambil langkah agresif untuk meningkatkan pengeluaran agregat melalui kebijakan fiskal. Kebijakan keuangan yang umumnya dikenal adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengelola anggaran dan

cadangan nasional. Pemerintah memiliki kemampuan untuk menyediakan pendanaan yang signifikan untuk proyek-proyek infrastruktur, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan insentif kepada dunia usaha yang melakukan investasi.

Teori Keynesian berlawanan dengan teori ekonomi klasik, yang menyatakan bahwa semua mekanisme ekonomi, mulai dari penentuan harga pasar hingga penentuan permintaan dan penawaran, harus berjalan sebagaimana mestinya (*laissez faire*). Beberapa poin penting dari teori Keynesian dalam (Meiriza et al., 2024) adalah:

1. Permintaan Agregat

Menurut Keynes, permintaan agregat adalah faktor penting dalam ekspansi ekonomi. Menurut model Keynesian, pemerintah dapat meningkatkan output dan kondisi pasar tenaga kerja dengan memenuhi pembayaran agregat melalui penggunaan uang dan pasar keuangan. Untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja, pemerintah harus meningkatkan kekuatannya dan memperketat anggarannya .

2. Kebijakan Fiskal

Menurut Keynes, pemerintah harus mengambil kebijakan fiskal untuk meningkatkan ambang batas pinjaman agregat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterlambatan pemerintah, penghapusan pajak, atau tingkat transfer sosial. Dalam situasi di mana perekonomian mengalami resesi, Keynes juga mendorong penggunaan alat moneter untuk mengurangi inflasi dan mengembalikan kesehatan perekonomian.

3. Kebijakan Moneter

Selain kebijakan fiskal, teori Keynesian juga menekankan pentingnya kebijakan moneter dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. Perubahan dalam dunia uang dapat meningkatkan tingkat output dengan cepat dan efektif dengan menggunakan investasi dan perdagangan saham. Mazhab Keynesian menekankan pada ekspansi keuangan dan moneter sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kenaikan permintaan agregat. fiskal dan moneter sebagai cara untuk mengatasi kekurangan permintaan agregat yang efektif.

2.1.2.4 Elastisitas *Tax Ratio* terhadap Inflasi

Elastisitas merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam ekonomi untuk mengukur respons perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dalam konteks inflasi, elastisitas inflasi menunjukkan sejauh mana perubahan ketika inflasi meningkat atau menurun. Adapun rumus secara umum untuk menghitung elastisitas:

$$E\partial = \frac{\partial TR}{\partial Inf} \times \frac{Inf}{TR}$$

Dimana:

$E\partial$: Nilai elastisitas

∂TR : Persentase perubahan *tax ratio* (Y)

∂Inf : Persentase perubahan inflasi (X)

Inf : Inflasi

TR : *Tax ratio*

2.1.2.5 Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Banyak negara cara mengatasi inflasi bisa berbeda karena penyebab inflasi masing-masing negara bisa berbeda. Secara umum cara menyelesaikan permasalahan inflasi menurut buku (Samuelson, P A & Nordhaus, 1996) dapat diselesaikan melalui beberapa kebijakan antara lain:

1. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter terfokus melalui jumlah uang yang beredar. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter dengan perubahan cadangan minimum bank, dengan mengubah tingkat suku bunga diskonto, operasi pasar terbuka, dan himbauan moral kepada bank umum.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan yang terdiri dari pengeluaran pemerintah dan perpajakan secara langsung yang dapat berpengaruh terhadap harga. Kebijakan fiskal. Menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi harga. Pengurangan permintaan total dan inflasi yang dapat ditekan merupakan celah satu dari kebijakan fiskal

3. Kebijakan yang dapat Berkaitan dengan Output

Kenaikkan output akan memperkecil laju inflasi. Kenaikkan jumlah output dapat dicapai dengan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

4. Kebijakan Penentuan Harga

Kebijakan terjadi karena adanya penetapan harga tertinggi (*ceiling price*) untuk harga barang-barang tertentu dan indeks harga tertentu untuk upah atau gaji.

2.1.3 Ekspor

2.1.3.1 Pengertian Ekspor

Ekspor merupakan penjualan barang dan jasa secara luas dari dalam negeri ke luar negeri (Mankiw, 2015). Sedangkan menurut (Juli, 2023) kegiatan ekspor merupakan sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dikaji dari sisi manfaat, Menurut Sukirno (Uli, 2016) manfaat dari kegiatan ekspor adalah : 1). Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia ke luar negeri. 2). Menambah Devisa Negara 3). Memperluas Lapangan Kerja.

(Afriamah et al., 2021) berpendapat ekspor merupakan kebalikan dari impor sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor sesungguhnya sama dengan faktor yang mempengaruhi impor. Faktor pendapatan negara lain mempengaruhi volume ekspor suatu negara. Meningkatnya pendapatan dunia, maka volume ekspor negara tersebut akan meningkat, bila faktor-faktor lain tetap (*ceteris paribus*). Demikian pula volume ekspor akan dipengaruhi oleh harga relatif antara negara. Semakin rendah harga relatif suatu negara terhadap luar negara lain, akan semakin tinggi volume ekspornya. Selanjutnya selera dan kebijaksanaan perdagangan akan mempengaruhi volume ekspor negara yang bersangkutan.

Permintaan ekspor seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor, seperti yang dinyatakan di bawah ini : 1). Harga barang itu sendiri 2). Harga barang lain yang sangat berkaitan erat dengan barang

tersebut 3). Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat 4). Jumlah penduduk 5). Selera 6). Ramalan yang akan terjadi di masa yang akan datang

2.1.3.2 Jenis-Jenis Ekspor

Dalam Mankiw (Mankiw, 2003) menjelaskan kegiatan ekspor terbagi menjadi 2, yaitu

1. Ekspor langsung

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

2. Ekspor tidak langsung

Ekspor tidak langsung adalah teknik dimana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) dan perusahaan pengeksportir (*export trading companies*). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang

2.1.3.3 Teori Ekspor

1. Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif (*theory of comparative advantage*) merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Teori keunggulan komparatif didasarkan pada nilai tenaga kerja (*theory of labor value*) yang diperkenalkan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya.

Jadi, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dengan memproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang dimana negara tersebut memiliki produksi yang relatif kurang efisien. Dengan menerapkan keunggulan komparatif, negara akan memproduksi dan mengekspor barang di mana mereka paling efisien, sehingga volume ekspor dapat meningkat. Peningkatan ekspor ini meningkatkan output ekonomi dan menghasilkan tambahan tax ratio, terutama dari pajak yang berkaitan dengan aktivitas ekspor dan produksi.

2. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*)

Adam Smith mengemukakan bahwa perdagangan antara dua negara didasarkan pada teori keunggulan mutlak (*absolute advantage*), bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan

spesialisasi produksi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan mutlak serta mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak (Kumar, 2012)

Teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa suatu negara mengekspor barang tertentu karena bisa menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari negara lain, dengan kata lain, memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tersebut (Kumar, 2012).

3. Teori Hecker-Ohlin (H-O)

Teori ini menekankan pada perbedaan relatif faktor pemberian alam dan harga faktor produksi antar negara sebagai penentu perdagangan yang paling penting, dengan asumsi bahwa teknologi dan citarasa sama. Teori H-O menganggap bahwa setiap negara akan mengekspor komoditi yang mempunyai faktor produksi berlimpah, dan murah serta mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif langka dan mahal. Teorema penyamaan harga faktor produksi menganggap bahwa perdagangan akan menghapuskan atau mengurangi perbedaan harga absolute dan harga relatif faktor produksi (Salvator, 1990)

Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah komposisi perdagangan antara beberapa negara bagaimana efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Disamping itu teori perdagangan internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional (*gains from trade*). Beberapa teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional pada dasarnya adalah seperti teori klasik, teori modern dan teori alternatif. Para ahli ekonomi klasik dan neo klasik sepakat bahwa perdagangan internasional bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor ekspor (Rangkuty & Efendi, 2022) :

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Perdagangan Luar Negeri.

Kegiatan ekspor akan meningkat apabila pemerintah memberikan kemudahan akses kepada para eksportir, kemudahan tersebut bisa berupa pengurangan atau bahkan penghapusan biaya ekspor, pemberian fasilitas produksi yang layak, penyederhanaan prosedur pengeksporan, serta penyediaan sarana dan prasarana ekspor.

2. Situasi Pasar di Dalam dan Luar Negeri.

Keadaan pasar di dalam dan luar negeri juga termasuk faktor yang mempengaruhi ekspor. Intensitas permintaan serta penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Jika dalam situasi dimana jumlah barang yang diminta pasar dunia lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang ditawarkan, maka sudah pasti harga akan cenderung naik. Jika sudah begitu, secara tidak langsung akan mendorong para eksportir untuk meningkatkan jumlah ekspornya.

3. Kepandaian Eksportir Dalam Memanfaatkan Peluang Pasar.

Tidak hanya faktor eksternal saja yang mempengaruhi kegiatan ekspor, dari dalam diri eksportir pun harus pandai mencari dan memanfaatkan peluang pasar yang tersedia. Eksportir harus bisa mencari celah untuk memperoleh

wilayah pemasaran yang lebih luas. Untuk itu, para eksportir setidaknya harus mempunyai keahlian di bidang pemasaran.

2.1.3.5 Elastisitas *Tax Ratio* terhadap Ekspor

Elastisitas merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam ekonomi untuk mengukur respons perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dalam konteks ekspor, elastisitas ini menunjukkan sejauh mana perubahan dan kepekaan ketika ekspor meningkat atau menurun. Adapun rumus secara umum untuk menghitung elastisitas:

$$E\partial = \frac{\partial TR}{\partial Ex} \times \frac{Ex}{TR}$$

Dimana:

$E\partial$: Nilai elastisitas

∂TR : Persentase perubahan *tax ratio* (Y)

∂Ex : Persentase perubahan ekspor (X)

Ex : Ekspor

TR : *Tax ratio*

2.1.4 *Foreign Direct Investment (FDI)*

2.1.4.1 Pengertian *Foreign Direct Investment (FDI)*

Menurut Krugman dalam (Suwardi, 2019) yang dimaksud dengan *Foreign Direct Investment (FDI)* adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh

karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Penanaman modal langsung untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non – migas yang berdaya saing di tingkat internasional.

Dalam bukunya menyatakan penanaman modal asing dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu:

a. Investasi portofolio

Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk perusahaan yang menerbitkan surat berharga belum tentu membuka lapangan kerja baru.

b. Investasi langsung

Investasi langsung atau disebut juga penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Bila dibandingkan dengan investasi portofolio, penanaman modal asing langsung (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing lebih memberi andil dalam silih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan mengingat masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.

Selain investor menanamkan modalnya di luar negeri, investor juga mencari keuntungan pasar besar dan ekspektasi keuntungan yang lebih besar. (Kurniati et al., 2007) dalam jurnalnya terdapat beberapa jenis FDI :

a. *Foreign Direct Investment* vertikal

FDI yang dilakukan menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang lebih rendah, kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk.

b. *Foreign Direct Investment* horizontal

FDI yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. FDI jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar baru. Keuntungan dari FDI dari jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang akan lebih dekat dengan konsumen.

2.1.4.2 Teori *Foreign Direct Investment*

Peran modal asing yang besar dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi, negara-negara berkembang menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing. Berbagai kebijakan diimplementasikan guna menciptakan iklim yang mendukung masuknya modal asing. Terdapat sejumlah teori yang menjelaskan determinan Foreign Direct Investment (FDI) dalam proses penentuan negara asal terkait pemilihan negara tujuan sebagai tempat penanaman modal.

1. Teori Ekonomi Neoklasik (*Neo-Classical Economic Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa penanaman modal asing memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi *host country* atau di mana negara mendirikan atau menanamkan investasinya. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*. Teori Ekonomi Neoklasik menekankan bahwa pasar bebas dan persaingan sempurna menciptakan efisiensi ekonomi. Ketika sumber daya dialokasikan secara optimal dan produktivitas meningkat, ekonomi tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi ini memperluas basis pajak negara karena peningkatan pendapatan dan keuntungan di sektor swasta menciptakan penerimaan tambahan, baik dari pajak penghasilan individu maupun pajak korporasi.

2. Teori Jalan Tengah (*The Middle Path Theory*)

Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap *host country*, karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

3. Teori Eklektik

Teori Eklektik Merupakan gagasan yang diajukan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu FDI. (Dunning, 1988) menawarkan pendekatan yang lebih holistik

dalam menjelaskan determinan FDI. Menurut Dunning, FDI akan terjadi ketika tiga kondisi terpenuhi:

1. Keuntungan kepemilikan. Perusahaan harus memiliki sejumlah keunggulan kompetitif khusus yang melampaui kelemahan untuk bersaing dengan perusahaan asing
2. Keunggulan lokasi. Melakukan aktivitas bisnis tersebut harus lebih *profitable* di lokasi asing dibandingkan dengan melakukannya di lokasi domestik.
3. Keuntungan internalisasi. Perusahaan tersebut harus mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk mengendalikan aktivitas bisnis asingnya dibandingkan dengan menggunakan perusahaan lokal independen untuk memberikan jasa tersebut.

Dari keempat teori yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan Teori Ekonomi Neoklasik menekankan manfaat positif FDI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional negara penerima. Sebaliknya, Teori Ketergantungan menganggap FDI merugikan, karena dapat menindas pertumbuhan ekonomi dan mengancam kedaulatan negara. Teori Jalan Tengah memandang FDI memiliki sisi positif dan negatif, sehingga negara penerima perlu mengembangkan kebijakan regulasi yang bijaksana. Sementara itu, Teori Eklektik menawarkan pendekatan holistik yang menjelaskan bahwa FDI terjadi ketika tiga kondisi terpenuhi: keuntungan kepemilikan, keunggulan lokasi, dan keuntungan internalisasi, yang kesemuanya mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri.

2.1.4.3 Tujuan dan Fungsi *Foreign Direct Investment*

Foreign direct investment mempunyai beberapa tujuan dan fungsi, yaitu:

1. Tujuan Foreign direct investment

- a. Untuk menarik arus modal yang besar ke suatu negara.
- b. Mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah dan pemanfaatan pajak lokal.
- c. Untuk menciptakan hambatan atau membuat tantangan dalam sebuah perdagangan bagi perusahaan lainnya.
- d. Untuk mendapatkan return yang tinggi dari negara sendiri dan sistem perpajakan yang lebih menguntungkan serta infrastruktur yang lebih baik dan memadai.

2. Fungsi *Foreign direct investment*

- a. *Foreign direct investment* mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat di suatu negara tersebut.
- b. *Foreign direct investment* dapat membantu dalam pembangunan ekonomi misalnya dalam proses industrialisasi yang sedang berlangsung.
- c. *Foreign direct investment* bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
- d. *Foreign direct investment* dapat menambah cadangan devisa negara.
- e. *Foreign direct investment* dapat membantu penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Foreign Direct Investment membawa dampak positif bagi suatu negara, seperti terbukanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta berkembangnya keterampilan dan kompetensi tertentu di kalangan tenaga kerja tersebut. Selain itu, FDI juga mendorong semangat kewirausahaan pengusaha lokal, yang berpotensi meningkatkan pendapatan yang memadai. Para pengusaha lokal juga terdorong untuk berkolaborasi dengan pihak asing dalam memproduksi barang dan jasa berkualitas tinggi. Dari sisi fiskal, negara memperoleh pendapatan dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) melalui berbagai aktivitas bisnis, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, FDI juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan nasional, terutama jika lembaga penanaman modal dan pihak pemberi izin tidak menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penegakan aturan secara konsisten. Dampak negatif ini diperparah ketika kebijakan dan regulasi yang ada tidak secara komprehensif mengatur aspek teknis yang memadai untuk memfasilitasi proses pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2.1.4.4 Elastisitas *Tax Ratio* terhadap *Foreign Direct Investment*

Elastisitas merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam ekonomi untuk mengukur respons perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dalam konteks FDI, elastisitas ini menunjukkan sejauh mana perubahan dan kepekaan ketika FDI meningkat atau menurun. Adapun rumus secara umum untuk menghitung elastisitas:

$$E\partial = \frac{\partial TR}{\partial FDI} \times \frac{FDI}{TR}$$

Dimana:

$E\theta$: Nilai elastisitas

∂TR : Persentase perubahan *tax ratio* (Y)

∂FDI : Persentase perubahan *Foreign Direct Investment* (X)

FDI : *Foreign Direct Investment*

TR : *Tax ratio*

2.1.4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment

Faktor-faktor yang dapat menjadi motivasi bagi investor asing untuk melakukan foreign direct investment di suatu negara adalah:

1. Access to mineral/natural resources.

Orientasi dari penanaman modal asing ini hanyalah untuk memperoleh sumber daya yang lebih murah dan efisien di mana sumber daya di negara asalnya sudah tidak lagi mencukupi, namun begitu dapat berorientasi terhadap perdagangan di mana negara investor berkeinginan mengimpor komoditas yang sudah kehilangan komparatifnya apabila diproduksi di negara asal investor.

2. Menghindari hambatan tarif

Tarif untuk suatu produk yang akan masuk di suatu negara dapat menghambat jalur perdagangan dan dapat mengurangi tingkat keuntungan sehingga mendirikan perusahaan di negara tersebut merupakan upaya untuk menghindari tarif tersebut.

3. Domestic market oriented

Pasar dari negara tuan rumah sangat menjanjikan dan dapat memperoleh profit yang lebih banyak jika dibandingkan dengan diproduksi di negara asalnya sendiri.

4. Tingkat upah pekerja yang relatif rendah

Kebanyakan upah di negara maju sudah terlalu tinggi bila dibandingkan dengan kapital dan berkembangnya produk baru yang lebih intensif modal dan pengetahuan sehingga alternatif untuk membuka atau mendirikan usaha industrinya di negara lain menjadi lebih menguntungkan, terlebih jika negara tujuannya mempunyai upah tenaga kerja yang lebih murah dari negara asalnya. Hal ini lah yang membuat para investor tertarik untuk melakukan investasi di negara lain, selain itu juga kemudahan regulasi dalam hal perizinan membuat para investor lebih tertarik menanamkan modalnya di negara lain.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* terhadap *tax ratio* di negara-negara asean tahun 2018-2022. penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penelitian dari (Wijaya & Dewi, 2022) " <i>Foreign Direct Investment And Its Implications Tax Ratio In Indonesia</i> "	Variabel Independen: <i>Foreign Direct Investment</i> , Inflasi Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Independen: Keterbukaan Perdagangan, Stabilitas Politik, Jumlah Penduduk	Keterbukaan perdagangan, FDI, inflasi, stabilitas politik dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap <i>tax ratio</i>	Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 8 No. 3, September 2022
2	Penelitian dari (Puspasari & Gazali, 2022) "Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi Terhadap Rasio Pajak di Indonesia Tahun 1990-2021"	Variabel Independen: <i>Foreign Direct Investment</i> , Inflasi Variabel Dependen: <i>Tax Ratio</i>	Variabel Independen: Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Ekonomi	Variabel keterbukaan perdagangan dan FDI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax ratio</i> . Variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax ratio</i> .	Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 2 No. 2, Oktober 2022
3	Penelitian dari (Rustian & Kusumastuti, 2023) "Pengaruh Pendapatan Nasional, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Terhadap Pajak Negara Indonesia Tahun 2008-2022"	Variabel Independen: Inflasi Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Independen: Pendapatan Nasional, Nilai Tukar, Suku Bunga	Variabel Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax ratio</i> . Variabel produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax ratio</i> .	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2 No. 4, April 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Penelitian dari (Sholikhah, 2020) "Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan, Konsumsi, Ekspor, dan Impor terhadap Pajak di Indonesia"	Variabel Independen: Ekspor Variabel Dependen: <i>Tax Ratio</i>	Variabel Independen: Kebijakan Tax Amnesty, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan, Konsumsi, Impor	Variabel konsumsi dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax ratio</i> . Variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, ekspor dan <i>tax amnesty</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax ratio</i> .	Jurnal Unsa, Vol.3 No. 2, September 2020
5	Penelitian dari (Gasparyene et al., 2022) "Impact of Foreign Direct Investment on Tax Ratio: The Case of the European Union"	Variabel Independen: FDI Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Independen: Daya Saing Negara	FDI memiliki dampak stimulus yang signifikan terhadap <i>tax ratio</i> , sementara daya saing tidak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i> .	<i>Journal Of Competitiveness</i> . Vol 14, No. 3, Februari (2022)
6	Penelitian dari (Mmbulaheni et al., 2024) "The Determinants Of Tax Ratio: A Study Of Southeast Africa"	Variabel Independen: Penanaman Modal Asing (FDI) Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Independen: Keterbukaan Ekonomi, Rasio Utang Luar Negeri, dan PDB	FDI, keterbukaan ekonomi, rasio utang luar negeri dan PDB berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i>	Cogent Economics & Finance, Vol. 10, No.1, Januari 2022
7	Penelitian dari (Andrejovská & Puliková, 2018) "Tax Ratio in the Context of Economic Determinants"	Variabel Independen: Penanaman Modal Asing (FDI) Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Independen: Produk Domestik Bruto, Tingkat Lapangan Kerja, Utang Pemerintah, Tarif Pajak Efektif, Tarif Pajak	Pengaruh terbesar terhadap <i>tax ratio</i> ditunjukkan oleh tingkat penyerapan tenaga kerja, produk domestik bruto, dan investasi asing langsung. Sementara utang pemerintah tidak	Montenegrin Journal of Economics, Vol. 14 No. 1, Maret 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i>	
8	Penelitian dari (Ky & Lim, 2023) " <i>The Level of Development and Tax Ratio in the Association of Southeast Asian Nations</i> "	Variabel Independen: Penanaman Modal Asing (FDI), Inflasi Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Independen: Keterbukaan Perdagangan, Nilai Tambah Industri, Nilai Tambah Pertanian, Stabilitas Politik, Indeks Pembangunan Manusia	FDI, inflasi, keterbukaan perdagangan, nilai tambah industri, nilai tambah pertanian, IPM memiliki pengaruh terhadap <i>tax ratio</i> . sedangkan stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i> di Asia Tenggara	<i>International Journal of Current Science Research and Review</i> . Vol. 6. No. 10, Oktober, 2023
9	Penelitian dari (Tricahyono & Wijaya, 2024) " <i>The Effect Of Economic Growth And Inflation On Value Added Tax Ratio In Asean Countries With Foreign Direct Investment As A Moderation</i> "	Variabel Independent : Inflasi Variabel Dependent: <i>Tax Ratio</i>	Variabel Independent: PDB Variabel Moderasi: FDI	PDB berpengaruh signifikan terhadap pajak, sedangkan inflasi negatif tidak signifikan terhadap <i>tax ratio</i> di negara ASEAN. Lalu FDI sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan	Educoretax. Vol. 4. No. 5 (2024)
10	Penelitian dari (Barlow, 2023) " <i>Export to tax ratio in Argentina: Embedded ideas of State Interventionism</i> "	Variabel Independen : Ekspor Variabel Dependen: <i>Tax Ratio</i>	Variabel Independen: Konflik politik, Redistribusi negara	Ekspor berpengaruh terhadap pendapatan pajak sedangkan konflik politik dan redistribusi tidak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i>	<i>Economy and Society</i> Vol.52, No.4, Desember 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Penelitian dari (Marlyanti & Sawitri, 2020) “Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Inflasi Terhadap Rasio Pajak”	Variabel Independen: Inflasi Variabel Dependen: <i>Tax Ratio</i>	Variabel Independen: Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak	Penagihan pajak berpengaruh terhadap <i>tax ratio</i> sedangkan variabel self assesment system, pemeriksaan pajak dan inflasi negatif dan signifikan terhadap <i>tax ratio</i>	Inventory: Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 4, Oktober 2020
12	Penelitian dari (Oktavia & Rahmadani, 2024) “Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Pajak dengan Ekspor sebagai Variabel Mediasi”	Variabel Independen: Inflasi Variabel Dependen: <i>Tax Ratio</i>	Variabel Independen: Suku Bunga, Nilai Tukar Variabel Mediasi: Ekspor	Inflasi dan tingkat suku bunga negatif dan signifikan terhadap <i>tax ratio</i> , namun nilai tukar dan ekspor tidak memiliki pengaruh. Ekspor dapat memediasi inflasi terhadap <i>tax ratio</i> . Namun, Ekspor tidak dapat memediasi tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap <i>tax ratio</i>	Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 7, No. 1, Januari 2024
13	Penelitian dari (Holzner et al., 2021) “How Do Corporate Taxes Affect to Exports”	Variabel Independen: Ekspor dan FDI Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Independen: Perdagangan Internasional	Perdagangan internasional berpengaruh negatif signifikan dalam jangka pendek terhadap <i>tax ratio</i> . Sedangkan ekspor dan FDI dalam jangka panjang berpengaruh positif signifikan.	Journal Vienna Institute for International Economic, Vol 2, No.3, November 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Penelitian dari (Kitessa & Jewaria, 2019)“ <i>Determinants of tax ratio in East African countries: An application of multivariate panel data cointegration analysis</i> ”	Variabel Independen: Inflasi Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Independen: PDB per Kapita, Bantuan Luar Negeri, Keterbukaan Perdagangan, Pangsa Industri, Pangsa Pertanian dan Pangsa Pasar, Urbanisasai dan Nilai Tukar	Hasil penelitian menunjukan bahwa PDB per Kapita, Bantuan Luar Negeri, Keterbukaan Perdagangan, Pangsa Industri, Pangsa Pertanian dan Pangsa Pasar memiliki kontribusi positif terhadap <i>tax ratio</i> . Sementara itu Inflasi, Urbanisasi dan Nilai tukar memiliki dampak negatif tidak signifikan terhadap <i>tax ratio</i> di Afrika Timur	Journal of Economics and International Finance, Vol 10, No. 11, November 2019
15	Penelitian dari (Xu & Liu, 2024) “ <i>Accelerated depreciation tax policy and multiple product firms’ export behaviour: evidence from China</i> ”	Variabel Independen : Ekspor Variabel Dependen: <i>Tax ratio</i>	Variabel Dependen:, Inovasi Perusahaan	Hasil penelitian menunjukan bahwa ekspor dan inovasi perubahan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax ratio</i> di China	Journal Applied Economics Letters Vol 1, No 7, Juni 2024

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2017) , kerangka pemikiran adalah suatu konsep yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengenali serta menetapkan kaitan antara masing-masing variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya dalam literatur yang ada. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini dapat dianggap sebagai sintesis dari interaksi variabel yang dirancang berdasarkan

berbagai teori yang telah dipaparkan. Kerangka pemikiran ini sangat dibutuhkan karena dapat memudahkan penulis dalam menganalisis serta melaksanakan penelitian mengenai pengaruh inflasi, ekspor dan foreign direct investment terhadap *tax ratio* di negara-negara ASEAN tahun 2018-2022.

2.3.1 Hubungan Inflasi dengan *Tax Ratio*

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan secara terus menerus (Hasyim, 2019). Inflasi yang merupakan variabel makro ekonomi yang dalam gilirannya inflasi berpotensi mempengaruhi nilai riil dari *tax ratio*, terutama jika kebijakan fiskal tidak melakukan penyesuaian yang memadai. *Tax ratio* nominal mungkin terlihat meningkat seiring dengan kenaikan harga, namun dalam kondisi inflasi, nilai riil dari pendapatan pajak tersebut dapat menurun. Hal ini mengakibatkan penerimaan negara yang secara riil lebih rendah daripada yang diindikasikan oleh angka nominal, terutama jika inflasi terus meningkat tanpa adanya penyesuaian tarif pajak.

Selain itu, elastisitas inflasi juga merupakan faktor penting karena elastisitas yang mengukur sejauh mana perubahan tingkat inflasi mempengaruhi *tax ratio* dalam suatu perekonomian. Hubungan antara elastisitas inflasi dan *tax ratio* sangat penting untuk melihat bagaimana sistem perpajakan beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah, terutama terkait dengan perubahan harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh inflasi.

Teori kuantitas uang (*Quantity Theory of Money*), menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan memicu kenaikan harga jika output produksi tidak dapat mengimbangnya. Di ASEAN, negara-negara dengan sistem pajak yang

bergantung pada pajak konsumsi atau penjualan akan melihat peningkatan *tax ratio* nominal akibat inflasi. Namun, menurut teori ini, kenaikan tersebut hanya bersifat nominal dan tidak memperhitungkan daya beli riil. Meskipun inflasi meningkatkan *tax ratio* dari PPN karena kenaikan harga barang dan jasa, nilai riil *tax ratio* tersebut dapat berkurang jika tidak ada penyesuaian dalam tarif pajak atau nilai ambang batas yang menyesuaikan inflasi.

Perspektif Keynesian, inflasi dipandang sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat, terutama ketika ekonomi beroperasi di bawah kapasitas penuh. Di negara-negara ASEAN, inflasi yang dihasilkan oleh peningkatan permintaan domestik dapat meningkatkan *tax ratio* dalam jangka pendek, terutama melalui pajak penghasilan dan pajak konsumsi. Namun, jika inflasi menjadi terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi riil karena masyarakat kehilangan daya beli.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marlyanti & Sawitri, 2020) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap *tax ratio*, lalu penelitian yang dilakukan (Kitessa & Jewaria, 2019) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap *tax ratio*. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia & Rahmadani, 2024) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap *tax ratio*. Penelitian yang dilakukan oleh (Rustian & Kusumastuti, 2023) menyatakan juga bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap *tax ratio*.

2.3.2 Hubungan Ekspor dengan *Tax Ratio*

Ekspor secara sederhana diartikan sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri

berdasarkan ketentuan yang berlaku (Maiti & Bidinger, 1981:20). Dalam konteks perekonomian global, ekspor menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja. Ketika ekspor meningkat, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional juga mengalami pertumbuhan pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Peningkatan ekspor mendorong kenaikan pajak perusahaan (*corporate tax*) serta pajak pendapatan individu yang bekerja di sektor-sektor terkait. Selain itu, peningkatan aktivitas ekspor dapat memberikan efek positif pada *tax ratio* dari pajak pertambahan nilai (PPN). Produk-produk yang diekspor biasanya dikenakan PPN di negara tujuan, namun ketika proses produksi dan distribusi dilakukan di dalam negeri, perusahaan tetap berkontribusi pada pembayaran PPN terkait proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang.

Untuk melihat kepekaan *tax ratio* terhadap ekspor terlihat dari elastisitas. Ekspor memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan internasional sebagai sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, elastisitas ekspor terhadap *tax ratio* menjadi faktor kunci dalam menentukan seberapa besar pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan penerimaan pajak dan stabilitas fiskal negara.

Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, suatu negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori ini menunjukkan bahwa dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien, suatu negara dapat meningkatkan

produktivitas dan daya saing globalnya melalui ekspor. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga memperkuat *tax ratio* melalui peningkatan nilai tambah dari barang dan jasa yang diekspor. Ketika negara fokus pada ekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, sektor-sektor terkait akan berkembang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya memperluas basis *tax ratio*.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sholikhah, 2020) yang mengatakan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax ratio*, karena dengan meningkatnya ekspor dapat meningkatkan *tax ratio*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Holzner et al., 2021) yang menyatakan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap *tax ratio*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Xu & Liu, 2024) menyatakan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax ratio*.

2.3.3 Hubungan *Foreign Direct Investment* dengan *Tax Ratio*

Foreign Direct Investment atau investasi asing langsung merupakan investasi di mana satu negara biasanya perusahaan atau individu melakukan investasi langsung ke dalam bisnis atau aset produktif di negara lain (Pavel et al., 2021). FDI memiliki peran penting dalam peningkatan *tax ratio* suatu negara, terutama di negara berkembang. Ketika perusahaan asing melakukan investasi di suatu negara, mereka biasanya membawa modal besar, teknologi, dan keahlian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi ini menciptakan lebih banyak peluang bagi perusahaan lokal untuk berkembang, yang pada gilirannya akan meningkatkan basis pajak.

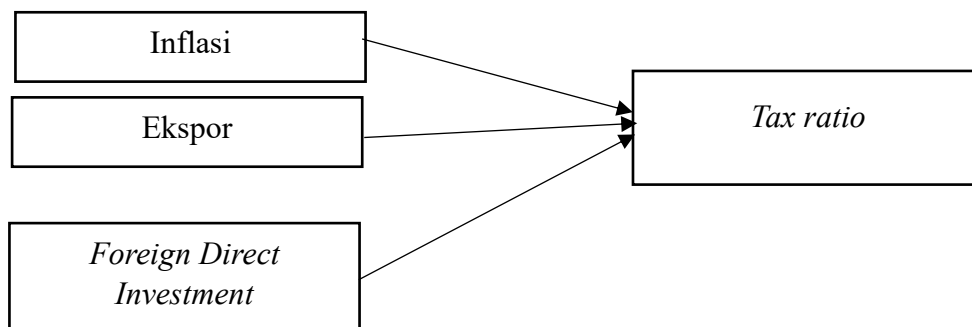
Elastisitas *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap penerimaan pajak menggambarkan sejauh mana perubahan dalam arus investasi asing mempengaruhi tingkat *tax ratio*, hubungan antara elastisitas FDI dan *tax ratio* menjadi kunci dalam memahami bagaimana arus investasi asing dapat memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan penerimaan pajak suatu negara.

Dalam teori ekonomi neo-klasik, FDI dipandang sebagai mekanisme yang mendorong efisiensi pasar melalui alokasi sumber daya yang lebih optimal. Neo-klasik berargumen bahwa modal akan mengalir ke negara-negara yang memiliki potensi keuntungan terbesar, yang umumnya ditandai dengan tingkat pengembalian modal yang tinggi dan kebijakan fiskal yang mendukung. Dengan demikian, masuknya FDI ke negara-negara berkembang akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya memperbesar basis pajak. Selain itu dalam teori eklektik yang dikembangkan oleh John Dunning dijelaskan keputusan perusahaan multinasional untuk berinvestasi di luar negeri didasarkan pada tiga keuntungan utama: kepemilikan (*ownership*), lokasi (*location*), dan internalisasi (*internalization*). Dari perspektif *tax ratio*, aspek lokasi menjadi penting karena negara penerima harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gaspareniene et al., 2022) dan (Andrejovská & Puliková, 2019) yang mengatakan bahwa FDI berpengaruh positif signifikan terhadap *tax ratio*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Ky & Lim, 2023) menyatakan bahwa *foreign direct investment* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *tax ratio*, lalu penelitian yang dilakukan

oleh (Holzner et al., 2021) menyatakan juga bahwa *foreign direct investment* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *tax ratio*.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya, hubungan inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* terhadap *tax ratio* digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Diduga secara parsial ekspor dan *foreign direct investment* berpengaruh positif sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap *tax ratio* di negara-negara ASEAN tahun 2018 – 2022.
- b. Diduga secara bersama inflasi, ekspor dan *foreign direct investment* berpengaruh terhadap *tax ratio* di negara ASEAN tahun 2018-2022.